

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PERSONALITAS RODRIGO DUTERTE DALAM KEBIJAKAN WAR ON DRUGS

Keberadaan peredaran narkoba dan obat bius di Filipina sebagai persoalan sosial dan keamanan yang serius kemudian mendorong pemerintah Filipina untuk melancarkan war on drugs. Kebijakan ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen, dari fungsi kepolisian sebagai institusi utama yang di dukung dengan institusi angkatan bersenjata Filipina. War on drugs ini dijalankan langsung atas perintah Presiden Duterte beberapa saat pasca terpilih sebagai presiden Filipina.

Implementasi war on drugs ternyata tidak lepas dari figur personalitas Rodrigo Duterte yang berupaya keras mewujudkan keamanan Filipina yang kondusif bersamaan dengan kebijakan war on terror. Kemudian kebijakan war on drugs juga tidak lepas dari dukungan partai politik dan masyarakat yang memotivasi Duterte untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pada bab III ini akan diuraikan lebih lanjut tentang implementasi kebijakan war on drugs, serta kapasitas Rodrigo Duterte dalam kebijakan ini.

A. Implementasi Kebijakan *War on Drugs* di Filipina

War on Drugs merupakan sebuah kebijakan secara sistematis dan komprehensif dalam menangani peredaran narkoba dan obat bius dalam lingkup nasional. Kebijakan war on drugs menjadi pendekatan politik-keamanan yang merujuk pada kebijakan-kebijakan serupa yang juga dijalankan oleh negara lain, misalnya Meksiko ataupun

Kolombia. Menurut Irris Ulvang yang merupakan jurnalis Filipina menyatakan bahwa :

”...war on drugs merupakan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte karena ini merupakan hutang politik ketika kampanye, bahkan konstituen yang sebelumnya tidak menentukan pilihannya ke Duterte akan berbalik karena inisiatif-inisiatif pada bidang keamanan, dimana masyarakat ketika itu cukup mendambakan stabilitas keamanan Filipina yang kondusif khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari Manila.”¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan *war on drugs* di Filipina tidak lepas inisiatif Duterte. Artinya keberadaan Duterte pasca kemenangannya sebagai presiden pada pemilu Filipina menjadikannya memiliki kewenangan dan posisi strategis untuk dapat menggerakkan atau memobilisasi berbagai elemen/insitusi Filipina.

Implementasi *war on drugs* tidak lepas dari berkembangnya persoalan narkoba dan obat bius yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan di Filipina. Dari data yang dikeluarkan oleh PDEA dari tahun 2002 hingga 2014 tercatat penurunan hanya terjadi satu kali. Gambaran mengenai jumlah korban pengguna/penyalahguna narkoba dan obat bius lihat tabel 3.1. sebagai berikut

¹ “Isu Keamanan Berhasil Tingkatkan Popularitas Duterte”, *Republika*, 24 Agustus 2016.

Tabel 3.1.
Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat
Bius di Filipina
Periode 2002-2014

No.	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1.	2002	9.880
2.	2004	10.420
3.	2006	11.040
4.	2008	11.010
5.	2010	12.210
6.	2012	12.330
7.	2014	12.370

Sumber : diolah dari PDEA, "Drugs in Philippines : Report Paper", Antien Journal and Publishing, Manila, 2015, chapter iii.

Dari tabel di atas maka dapat difahami bahwa dari tahun ke tahun umlah pengguna narkotika dan obat bius di Filipina terus menunjukkan tren peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2008, namun ini hanya bersifat eforia karena prosentase yang kecil. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Duterte dalam mencanahgkan *war on drugs*.

War on Drugs (Oplan Tokhang) atau perang terhadap narkotika dan obat bius di Filipina dijalankan oleh Presiden Rodrigo Duterte sejak 30 Juni 2016 dan terus berlangsung hingga awal tahun 2017. Kebijakan ini dijalankan secara reaktif pasca terpilihnya Duterte sebagai presiden Filipina. Kebijakan ini melibatkan beberapa elemen/institusi, bukan hanya pemerintah, namun juga kelompok masyarakat. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Elemen-elemen Yang Terlibat Dalam War on Drugs
Tahun 2016

No.	Institusi	Keterangan
1.	Kepolisian Nasional Filipina	Personel yang dilibatkan sekitar 6.500 dan yang didukung personel non-organik sebagai ujung tombak penegakan hukum.
2.	Angkatan Bersenjata Filipina	Personel yang dilibatkan sekitar 5.800 dan yang didukung personel non-organik sebagai ujung tombak penindakan di lapangan dan evakuasi, serta mobilisasi laut dan udara.
3.		
4.	PDEA (<i>Philippines Drugs Enforcement Agency</i>) CPP (<i>Communist Party of Philippines</i>), MLF (<i>Moro Liberation Front</i>) dan MILF (<i>Moro Islamic Liberation Front</i>).	Mendukung investigasi, penegakan hukum dan rehabilitas korban. Dukungan informasi dan mapping area.

Sumber : “Philippines Information Agency”, dalam <https://thewire.in/114380/philippines-police-relaunch-war-drugs/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

Melalui tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam war on drugs ternyata bukan hanya dari pemerintah atau masyarakat, namun juga kelompok yang selama ini didefinisikan sebagai organisasi teroris, yaitu

MLF dan MILF. Ini sekaligus menjadi prestasi yang menunjukkan kemampuan Duterte dalam membangun konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak lawan untuk mewujudkan kepentingan bersama, yaitu Filipina yang bebas dari narkoba dan obat bius.

Langkah Duterte dalam mengikutsertakan CPP, MLF dan MILF dikarenakan di pihak pemerintah kekurangan personel dan sumber daya manusia, serta penguasaan medan, dimana sebagian kasus-kasus peredaran narkoba dan obat bius terjadi di wilayah pedalaman. Sedangkan di pihak organisasi teroris, ketersediaan dalam kebijakan war on drugs karena adanya pertimbangan ideologis, dimana narkoba dan obat bius merupakan benda haram yang dilarang oleh agama, serta adanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Filipina berupa uang ataupun inisiatif untuk dapat bergabung angkatan bersenjata/kepolisian nasional Filipina.²

Sebelum menjadi Presiden, Duterte pernah menjadi Walikota Davao hingga tahun 1998. Sejak menjadi walikota, julukan “The Punisher” telah melekat di sosok Duterte. Alasannya, Duterte sangat tegas dalam mengatasi tindak kriminal di kota tersebut sehingga membuat ciut nyali para pelaku kriminal di Davao. Alhasil, angka kriminalitas di kota Davao menurun secara signifikan hingga tahun 2000. Sayang, cara yang dipilih Duterte tergolong kejam. Di bawah kepemimpinannya, banyak orang yang tewas dengan cara misterius.³

Beberapa aktivis mengaku bahwa mereka memiliki dokumentasi ratusan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok penjagal saat Duterte masih menjabat walikota,

² “MILF Joins Duterte to War on Drugs”, dalam <http://globalproductreview.com/milf-joins-dutertes-war-on-drugs-inquirer-net/>, diakses pada tanggal 7 November 2017.

³ “Who Is President Duterte”, dalam <http://newsinfo.inquirer.net/793138/profile-rodrico-duterte>, diakses pada tanggal 4 Juli 2017.

dimana aksi pembunuhan ini diinstruksikan secara langsung oleh Duterte. Davao sendiri merupakan kampung halaman Duterte. Dia lahir dan dibesarkan di sana. Duterte juga pernah menjabat menjadi wakil walikota dan anggota kongres di provinsi tersebut.

Duterte berjanji kepada rakyatnya akan mengakhiri perdagangan obat-obatan terlarang di Filipina dalam kurun waktu 3-6 bulan mendatang. Hal ini terbukti sejak dilantik dan menjabat pada tanggal 1 Juli, selama pemerintahan Duterte, hampir 3.000 orang telah tewas. Sementara, lebih dari 4.400 orang yang terkait narkoba telah ditangkap. Duterte juga mengiming – imingi hadiah sebesar 2 juta peso atau sekitar Rp 570 juta kepada siapa saja yang berhasil menangkap polisi atau pejabat yang melindungi gembong narkoba di Filipina.⁴

Kebijakan war on drugs yang dicanangkan Duterte ternyata mendapatkan berbagai tentangan karena aksi kerasnya ini, Duterte diprotes oleh kelompok pembela HAM seperti Human Right Watch and Amnesty International. Dia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan membunuh orang tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Kampanye anti narkobanya ini juga pernah diprotes oleh organisasi PBB yang menganggap program, tersebut ilegal.

Dalam kampanyenya pada 7 Mei lalu di Manila, Rodrigo Duterte menyatakan bahwa :

“...Lupakan hak asasi manusia. Jika saya berhasil masuk istana kepresidenan, saya hanya akan melakukan apa yang telah saya lakukan sewaktu menjadi wali kota dulu. Kalian para pecinta narkoba, tukang sembunyi dan tak mau berbuat apa-apa, lebih baik enyah saja kalian. Karena saya akan bunuh kalian. Saya akan buang kalian semua ke Teluk

⁴ “Becoming Duterte : The Making of Philippines Strongman”, dalam <https://www.nytimes.com/2017/03/21/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-strongman.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

Manila untuk menggemukkan perut ikan-ikan di sana,”⁵

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa war on drugs merupakan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Filipina yang memiliki legitimasi dan sah. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari gebrakan dari kepemimpinan Rodrigo Duterte pasca terpilihnya sebagai presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino III. Meskipun mendapatkan berbagai reaksi dan pro dan kontra, namun war on drugs ternyata dapat menekan perkembangan peredaran dan operasional kartel narkoba dan obat bius di Filipina sejak tahun 2016.

B. Kapasitas Rodrigo Duterte Dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina

Keberadaan pemimpin memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi kepemimpinan Rodrigo Duterte. Menurut analisis politik regional Asia Tenggara, James Edgar Chow dari Nanyang University, Singapura menyatakan bahwa :

“...masalah keamanan menjadi persoalan serius bagi beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Pada setiap kepemimpinan dikotomi antara tindakan tegas dan supremasi HAM menjadi masalah yang dilematis. Terpilihnya Duterte menjadi babak baru bagi penanganan extra ordinary crime, dimana political will lebih kuat dan berhasil menyingkirkan apa yang disebut nilai/norma internasional. ini akan

⁵ “Presiden Filipina : Saya Tidak Peduli Dengan HAM”, dalam <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-pedul-dengan-ham.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2017.

*sulit tercapai tanpa disertai dengan komitmen dan figur personalitas yang kuat.”*⁶

Keberadaan Duterte dalam war on drugs mampu memainkan peranan penting dalam memprioritaskan persoalan keamanan ini dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Dalam kampanye-kampanye Duterte menyatakan bahwa *security first* atau kebijakan keamanan yang didahulukan untuk dapat menjamin kelangsungan pembangunan di Filipina.

Dalam tiga pilar program pembangunan, Rodrigo Duterte menyatakan bahwa kepemimpinnya akan memprioritaskan tiga pencapaian utama pemerintahan, masing-masing adalah :⁷

- a. Pilar pencapaian bidang keamanan, bidang ini akan menjadi prioritas tiga paruh tahun pertama untuk dapat menjamin stabilitas sosial ekonomi yang diwujudkan melalui *war on drugs, war on terror* dan *war on corrupt*.
- b. Pilar pencapaian bidang sosial-ekonomi, bidang ini akan menjadi prioritas setelah pencapaian bidang keamanan dapat terwujud dengan membangun unit-unit usaha rakyat, memperkuat sektor manufaktur dan kapaitas ekspor Filipina.
- c. Pilar pencapaian bidang politik bidang ini akan menjadi prioritas setelah pencapaian bidang sosial ekonomi terwujud dengan mempekuat kapasita lobi-lobi pemerintah agar terbangun iklim dan stabilitas politik ayang kondusif yang progresif terhadap kebijakan-kebijakan Rodrigo Duterte.

⁶ James Edgar Chow, “The Strongman of Rodrigo Duterte : New Law Encorfement Concept”, *The Journal of Public Policy and International Relations*, Vol. IV, Nanyang University Press, Singapore, 2016, hal.9.

⁷ *Ibid.*

1. Figur Personalitas Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte lahir di Massin, Leyte Selatan, Filipina, 28 Maret 1945. Rodrigo yang ber juluk Digong, lahir dari pasangan Cebuano Vicente G. Duterte dan Soledad Roa Duterte. Vicente, Ayah Rodrigo, adalah pengacara yang juga menjabat sebagai Gubernur Davao dan Soledad Roa (waktu itu belum dibagi). Vicente berasal dari Cabadbaran, Agusan. Awalnya, Ayah Rodrigo adalah seorang guru sekolah dan menjadi pemimpin Civic. Selain menjadi Gubernur, Ayah Rodrigo juga pernah menjadi Walikota Danao di Cebu.⁸

Rodrigo Duterte sejak kecil hidup dalam keluarga politisi. Selain Ayahnya yang menjadi pejabat, sepupu dan pamannya juga politisi dan menduduki jabatan strategis di Filipina. Nalar politik Rodrigo terbentuk memang sedari kecil di lingkungan keluarganya. Roland, sepupunya, adalah Walikota Kota Cebu (1983-1986). Sedangkan Ramon Duterte, ayah Rolan juga pernah menduduki jabatan tersebut pada tahun 1957 sampai tahun 1959.

Rodrigo Duterte memiliki hubungan kekeluargaan dengan klan Visayan dan mempunyai ikatan kekerabatan dengan klan Durano dan Almendras sebagai keluarga politik. Ikatan kekeluargaan dan kekerabatan keluarga Rodrigo ini, kemudian menjadi kekuatan besar di Filipina, khususnya di Kota Davao. Kota Davao merupakan kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di pulau Mindanao. Kekuatan politik keluarga Rodrigo menjadikannya sebagai penguasa pulau tersebut selama 7 masa jabatan, dengan total lebih dari 22 tahun.⁹

Kehidupan Duterte di wilayah pedesaan berhasil mempengaruhi tumbuh kembangnya sebagai sosok yang tegar

⁸ “Biografi Kontroversial Rodrigo Duterte”, dalam <http://nusantaranews.co/biografi-politisi-kontroversial-rodrigo-duterte/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

⁹ Richard Davad Herdaryan, *The Rise of Duterte : A Populist Against Elite Democracy*, Palgraff Mc Millan, Singapore, 2017, hal.12.

dan tegas dalam membuat kebijakan. Dalam pergaulannya masa kecilnya, Duterte selaku menjadi ketua kelas di sekolah dasar dan menengah di wilayah Massin. Duterte juga ditakuti oleh anak-anak lain yang menjadikan pemimpin sekolah pada masa itu.

Rodrigo menjalani pendidikannya di Lyceum Universitas Filipina (BA) dan Kolese Hukum San Beda (BL), nantinya setelah Rodrigo dewasa dan berkecimpung dalam dunia politik, sebagai generasi penerus keluarganya, ia memulai debut karir politiknya sebagai Wakil Walikota dan anggota kongres di kota Davao tersebut. Rodrigo menjabat sebagai Wakil Walikota Davao sejak 30 Juni 2013.

Rodrigo Duterte memulai karir politiknya sejak 2 Mei 1986-27 November 1987 sebagai Wakil Walikota Davao yang dipimpin oleh Jacinto T. Rubillar. Periode selanjutnya, Rodrigo Duterte menduduki jabatan Walikota Kota Davao pertama 2 Februari 1988- 19 Maret 1998 menggantikan posisi Jacinto T. Rubillar yang menjabat sebelumnya. Setelah Rodrigo lengser diganti oleh Benjamin C. de Guzman. Setelah masa jabatan Benjamin C. de Guzman berakhir, kursi Walikota Kota Davao kembali diduduki oleh Rodrigo Duterte sejak 30 Juni 2001-30 Juni 2010 dan yang menjadi Wakil Walikota adalah Sara Duterte. Periode selanjutnya, 30 Juni 2010 – 30 Juni 2013 dijabat oleh Sara Duterte dan Rodrigo sebagai Wakil Walikota. Setelah satu masa jabatan Sara Duterte selesai, Rodrigo Duterte kembali naik menjadi Walikota sejak 30 Juni 2013.¹⁰

Selain menduduki jabatan Walikota dan Wakil Walikota Davao, Rodrigo juga pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Filipina dari distrik ke-1 Kota Davao dari 30 Juni 1998 sampai 30 Juni 2001. Sebagai politisi ulung, Rodrigo memiliki loyalitas terhadap partainya yaitu Partai

¹⁰ “Rodrigo Duterte : The President of Philippines”, dalam <https://www.biography.com/people/rodrigo-duterte-102616>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

Politik PDP-Laban (Nasional) dan Partai Hugpong Sa Tawong Lungsod di tingkat Lokal. Di samping itu, Rodrigo juga memiliki afiliasi dengan Lex Talionis Fraternitas.¹¹

Pasca kemenangannya dalam pemilu presiden Filipina, Rodrigo Duterte kemudian mulai mengkonsolidasikan tiga pilar pencapaian pembangunan yaitu bidang keamanan dengan mengikutsertakan stakeholder dan institusi terkait. Dalam *war on drugs*, salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak kebijakan Duterte ini adalah PDEA. Institusi ini didirikan sejak 7 Juli 2002 yang berpusat di Quezon. Pada rezim sebelumnya PDEA kurang optimal dalam menjalankan fungsinya karena adanya tumpang tindih peran dengan Kepolisian Nasional Filipina, kemudian ketika Duterte menjabat PDEA mengalami revitalisasi, dimana institusi ini langsung berada di bawah supervise presiden sebagai kepala institusi dan angkatan bersenjata tertinggi Filipina.¹²

PDEA menjadi bagian dari narkopolitik, dimana *war on drugs* menjadi program gerakan nasional yang bertanggung-jawab untuk mencegah, menyelidiki dan memberantas narkoba dan obat bius. Kebijakan ini meliputi bahan dasar narkoba, serta narkoba dengan *political will* (sikap politik) dari Duterte untuk dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari setahun.

2. Pengaruh Dari Partai Pendukung dan Masyarakat

Masyarakat (*civil society*) memiliki peranan penting dalam mekanisme pembuatan kebijakan di negara demokratis. Di Filipina sendiri, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelas menengah (*middle class*) dan kelompok masyarakat akar rumput (*grass root*). Diperkirakan jumlah

¹¹ *Ibid.*

¹² “Duterte : Wants More to PDEA”, dalam

<http://www.sunstar.com.ph/manila/local-news/2017/11/23/palace-duterte-wants-more-pdea-576304>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

kelas menengah di Filipina mencapai 52 persen dan kelompok inilah yang turut berkontribusi dalam memenangkan Duterte dalam pemilu Filipina tahun 2016.

Setelah 7 periode fokus menjadi pejabat Kota Davao, pada 21 November 2015, Duterte mendeklarasikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina dalam pemilihan Presiden 2016. Di usianya yang ke-71, Rodrigo dengan segala macam kontroversi tentang dirinya, masih energik dalam dunia politik-kekuasaan. Sosok Rodrigo yang mengundang banyak kontroversi dari banyak kalangan, rupanya tidak mengurangi jumlah pendukungnya. Rakyat Filipina mayoritas memberikan dukungan terhadap Rodrigo dalam pemilihan Presiden tahun ini. Sebagai pribadi dan politisi, Rodrigo dengan kerendahan hatinya yang besar, siap menjalankan mandat yang diberikan rakyat kepadanya.¹³

Mayoritas rakyat Filipina menjagokan Rodrigo sebagai calon presiden terkuat karena beberapa hal. Salah satunya adalah janji Rodrigo yang mampu meyakinkan rakyat Filipina bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Bahkan Rodrigo berjanji, tidak hanya dalam keadaan menjalankan tugas, janji itu akan dilaksanakan dalam keadaan tidur sekalipun. Inilah salah satu kontroversi sederhana dari Rodrigo. Bagi Rodrigo, menjadi pemimpin harus total untuk melayani bangsa dan negaranya.

Rakyat Filipina memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Rodrigo. Rakyat memiliki keyakinan bahwa Rodrigo jika jadi Presiden Filipina, dirinya mampu memulihkan situasi Filipina dan dapat menyatukan rakyat. Rodrigo jadi Presiden, pembangunan Filipina berlanjut. Namun, Presiden Benigno Aquino, mengkhawatirkan sosok Rodrigo yang menjadi pujaan rakyat itu. Bagi Benigno Aquino, sumpah dan retorika Rodrigo yang berapi-api untuk memberikan hukuman mati

¹³ “What Philippines Think about Duterte”, dalam http://www.huffingtonpost.com/cecilia-brainard/what-filipinos-think-of-p_b_11754316.html, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

bagi pelaku tindak kriminal, bisa melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter. Kekhawatiran tersebut, membuat Benigno melakukan siasat dengan mengumpulkan para kandidat supaya bersatu demi mengalahkan kekuatan Rodrigo.¹⁴

Sebuah lembaga survey yang dimotori oleh media Phil Star sebagai monitoring berlangsungnya pemilihan Presiden, Duterte mendulang suara jauh lebih banyak dari rival terdekatnya, yaitu Mar Roxas. Lembaga PPCRV ini sudah diakreditasi oleh pemerintah Filipina sehingga dapat dibenarkan keakuratan datanya. Pelaksanaan pemilihan Presiden Filipina pada tanggal 9 Mei 2016, dengan lima kandidat calon Presiden Filipina diantaranya Rodrigo Duterte, Manuel Roxas, Grace Poe, Miriam Santiago dan Jejomar Binay. Salah satu dari lima kandidat tersebut akan menggantikan Presiden Benigno Aquino.¹⁵

Keunggulan Rodrigo berdasarkan pada sejarah gerakan politiknya yang di Kota Davao sejak tahun 1988. Rodrigo sebagai Walikota Kota Davao dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, cenderung kasar, dan kontroversial. Kontroversi dalam diri Rodrigo yakni ucapan-ucapan dan tindakannya sebagai Walikota. Mulai dari lelucon yang dilontarkan sampai kebijakan yang dilakukan tidak sedikit yang kontroversi. Misalnya, Rodrigo pernah mengungkapkan lelucon tentang dirinya sendiri yang ingin memperkosa misionaris wanita berkebangsaan Australia yang meninggal dalam insiden kerusuhan di sebuah penjara pada tahun 1989 silam. Selanjutnya, bulan Januari 2015 tahun lalu, Rodrigo menyebut Paus Fransiskus sebagai anak pelacur. Hal itu terjadi karena Rodrigo terjebak macet oleh rombongan Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Filipina.

¹⁴ “Public Support of Duterte War on Drugs Beginning to Slip”, dalam <http://philippineslifestyle.com/blog/2017/04/19/public-support-for-dutertes-war-on-drugs-beginning-to-slip/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017.

¹⁵ *Ibid.*

Dalam perkembangan kebijakannya yang kontroversi, rencananya menghancurkan para pelanggar hukum di Filipina secara umum sebagaimana terjadi di Kota Davao. Rodrigo tidak akan hirau dengan Hak Asasi Manusia (HAM), siapapun dari rakyat Filipina yang menjadi pengedar narkoba, perampok, bahkan pemalas, Rodrigo menyarankan untuk henggang dari Filipina, jika tidak akan dijatuhi hukuman mati. Berkaitan dengan statemennya, Rodrigo mendapat julukan “The Punisher” atau Sang Penghukum yang oleh Presiden Benigno Aquino disebut sebagai calon diktator seperti halnya Adolf Hitler. Sebanyak apapun bahasa-bahasa yang diucapkan Rodrigo, sama sekali tidak membuat pendukungnya berbalik arah. Mereka para pendukung Rodrigo juga tidak hirau dengan julukan kejam yang dilabelkan terhadap sosok Rodrigo. Slogan ‘change is coming’ atau kedatangan perubahan yang dikampanyekan membuat pendukungnya mantap mendukung Rodrigo dalam pemilu Filipina tersebut.¹⁶

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa war on drugs menjadi kebijakan keamanan yang tidak lepas dari posisi Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang secara otomatis akan memiliki kewenangan yang begitu besar terhadap insitusi-insitusi, termasuk militer dan kepolisian nasional Filipina. Kebijakan war on drugs ini pada akhirnya dijalankan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada bab selanjutnya (bab IV).

¹⁶ “Duterte Among Strongman Leader Trumps Has Praised”, dalam <http://www.philstar.com/headlines/2017/05/02/1695989/duterte-among-strongman-leaders-trump-has-praised>, pada tanggal 7 Juli 2017.